



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat Ke- | : 23 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Kamis, 28 November 2019 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : Pembahasan Rencana Strategis Kemendagri dan BNPP dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024 |
| Ketua Rapat | : H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 26 (dua puluh enam) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kemendagri dan BNPP dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, hari Kamis, 28 November 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat ini membahas mengenai Rencana Strategis Kemendagri dan BNPP dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri RI

Sesuai tugas dan fungsi serta peran Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, penegakan demokrasi dan menjaga integritas bangsa, dengan melaksanakan pelayanan publik serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan dan strategi Kemendagri dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung perwujudan 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2024 yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyerdahanaan Regulasi
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kami akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dan Forkopimda.
- b. Memberikan peringatan dan pengawasan agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja APBD sesuai program prioritas nasional.
- c. Penguatan peran dan kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- d. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP daerah, dan aparat penegak hukum.
- e. Melakukan penyesuaian terhadap R-APBD/APBD TA 2020 sesuai 5 program prioritas yang ditetapkan Presiden.

3. Pemenuhan Kekurangan Blangko KTP-el Tahun 2019

Dalam rangka penyediaan blangko KTP-el tahun 2019, dari 16 juta keping blangko KTP-el yang telah dialokasikan dalam DIPA Kementerian Dalam Negeri, seluruhnya telah habis sampai dengan akhir bulan April 2019. Sehingga terdapat kebutuhan blangko KTP-el sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 11 juta keping, yang terdiri dari 8 juta keping untuk pelayanan blangko tersebut, Kementerian Dalam Negeri baru dapat mengupayakan pemenuhannya sebanyak 3.562.281 keping blangko dengan anggaran sebesar Rp37.156.872.451,-, yang bersumber dari:

- a. Optimalisasi anggaran internal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebesar Rp35.156.872.451,-; dan
- b. Pemanfaatan pagu insentif Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebesar Rp2.500.000.000,-.

Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan kekurangan blangko KTP-el sampai dengan akhir Desember 2019 sebanyak 7.437.719 keping dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp78.624.127.549,-. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan, dan menyatakan belum dapat memenuhi usulan tambahan anggaran yang dimaksud.

Kementerian Dalam Negeri kembali akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el sampai dengan akhir tahun 2019 secara minimal, yaitu sebanyak 1,5 juta keping dengan anggaran sebesar Rp15.900.000.000,- yang bersumber dari optimalisasi internal Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya, diharapkan persetujuan Komisi II DPR RI atas optimalisasi anggaran internal Kementerian Dalam Negeri tahun 2019, berupa pergeseran pagu antar program untuk pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el dimaksud.

4. Arah Kebijakan Penataan Daerah

Kemendagri akan melanjutkan penyelesaian penyusunan RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Kemendagri memetakan 314 usulan pembentukan daerah otonom baru yang telah diterima.

Disamping itu, Kemendagri melakukan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan dalam menuntaskan penyelesaian Personil, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D), segmen batas daerah dan pengalihan aset yang belum selesai pada 223 daerah otonom hasil pemekaran periode 1999-2014. Sedangkan untuk rencana pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat, Kemendagri akan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Keuangan Partai Politik

6. Pengalihan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Kemendagri

Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang juga menjadi pembahasan pada pertemuan ini, sebagai berikut:

1. Persiapan pilkada serentak
2. Pembinaan perangkat desa
3. Pelayanan publik di pemerintah daerah yang masih kurang responsif
4. Persiapan pemindahan ibu kota
5. Pemekaran daerah otonomi baru
6. Evaluasi DOB

7. Penguatan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan agar mampu mendorong pemerintah desa
8. On single submission yang belum efektif
9. Permasalahan surat keterangan penduduk
10. Perkembangan penyetakan e-KTP dan perekaman e-KTP
11. Penguatan inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota agar dapat mencegah korupsi

III. KESIMPULAN

Terhadap Rancangan Strategis Tahun 2019 – 2024 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang telah disampaikan, secara prinsip Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami dengan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri untuk segera menyelesaikan RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang merupakan amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta meminta kepada Kemendagri untuk segera menuntaskan penyelesaian permasalahan terkait Personil, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D), segmen batas daerah, dan pengalihan asset yang belum selesai pada daerah otonom hasil pemekaran periode 1999 – 2014.
2. Komisi II DPR RI bersama-sama dengan Kemendagri sepakat untuk melakukan penyempurnaan/revisi seluruh undang-undang terkait dengan sistem politik Indonesia khususnya tentang pemilihan (pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah) selambat-lambatnya di awal tahun 2021.
3. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendagri terkait upaya peningkatan kapasitas Partai Politik (Parpol) melalui pemberian bantuan keuangan Parpol, dan meminta kepada Kemendagri agar segera merealisasikan penyaluran dan mengupayakan peningkatan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi II DPR RI mendukung BNPP melakukan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

5. Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perbatasan negara, benar-benar ditujukan untuk menjaga integritas wilayah negara sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Jakarta, 28 November 2019
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270